

Praktik Ethical Hacking untuk Menjamin Keamanan Sistem Sebagai Upaya Mewujudkan Keamanan dan Kerahasiaan Data Pribadi: Studi Komparasi Pengaturan Indonesia dan Kanada = Ethical Hacking Practices to Ensure System Security as an Initiative to Achieve Personal Data Security and Confidentiality: A Comparative Study of Indonesian and Canadian Regulations

Amaraduhita Laksmi Prabhaswari, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=9999920575366&lokasi=lokal>

Abstrak

Pada era digital yang semakin terintegrasi dengan sistem elektronik dan teknologi, isu terkait keamanan dan kerahasiaan data pribadi menjadi suatu isu krusial, terutama di tengah jumlah serangan siber yang kian meningkat. Urgensi perlindungan ini semakin mendesak seiring dengan kompleksnya pemanfaatan teknologi oleh PSE, baik publik maupun privat. Praktik ethical hacking melalui perluasan hak dengan kontrak atau kebijakan mulai muncul sebagai upaya proaktif dalam mengidentifikasi dan menanggulangi celah keamanan dalam suatu sistem. Meskipun di Kanada praktik ini sudah diakui sebagai bagian dari kebijakan keamanan nasional (RVDP), Indonesia belum memiliki pengaturan dan membuka kebijakan (VVIP) tersebut kepada publik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaturan ethical hacking di Indonesia dan Kanada termasuk kebijakan perlindungan bagi ethical hacker, baik certified maupun voluntary. Metode yang digunakan adalah penelitian doktrinal dengan pendekatan perundang-undangan dan kebijakan yang ada, serta didukung oleh data wawancara dari narasumber yang kredibel. Hasil penelitian menunjukkan bahwa walaupun Kanada dan Indonesia sama-sama sudah memiliki kebijakan tersebut, tetapi kebijakan Kanada sudah berlaku secara nasional dan terbuka sebagai bentuk kolaborasi antara pemerintah, PSE, dan ethical hacker, serta memberikan perlindungan bagi mereka secara lebih terjamin. Sedangkan, di Indonesia kebijakan tersebut masih merupakan peraturan internal suatu lembaga saja yang tidak berlaku dan tidak mengikat bagi masyarakat luas.

.....In the digital era that is increasingly integrated with electronic systems and technology, issues related to the security and confidentiality of personal data have become a crucial issue, especially in the midst of the increasing number of cyber attacks. The urgency of this protection is increasingly urgent along with the complex use of technology by PSE, both public and private. The practice of ethical hacking by contract-based or policy-based emerged as a proactive effort in identifying and addressing security gaps in a system. Although in Canada this practice has been recognized as part of national security policy (RVDP), Indonesia has not yet regulated and opened the policy (/VVIP) to the public. This research aims to analyze ethical hacking arrangements in Indonesia and Canada including protection policies for ethical hackers, both certified and voluntary. The method used is doctrinal research with the approach of existing legislation and policies, and supported by interview data from credible sources. The results show that although Canada and Indonesia both have such policies, Canada's policy is nationally applicable and open as a form of collaboration between the government, PSEs, and ethical hackers, and provides more guaranteed protection for them. Meanwhile, in Indonesia, the policy is still an internal regulation of an institution that is not applicable and binding for the wider community.